POTENSI OBYEK WISATA DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL

Oleh

ABD. REZA ACHMAD
NIM : DO1416003

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
GORONTALO

2020

Potensi Obyek Wisata Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Gorontalo

Abd. Reza Achmad[1)] Harijono Imran[2)] Joice Muhmud[3)]

Abstrak

Sektor pariwisata senantiasa menjadi primadona bagi sumber pendapatan daerah jika daerah tersebut memiliki potensi wisata yang potensial serta dikelolah dengan professional. Obyek wisata menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan untuk dikunjungi. Semakin banyak kunjungan wisata akan berdampak pada penerimaan retribusi daerah khusunya pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi obyek wisata dalam menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data kurun waktu (timeseries) dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi obyek wisata di Kabupaten Gorontalo setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) terus mengalami penurunan dilihat dari capaian realisasi. Namun masih belum mampu memberikan kontribusi dalam menunjang PAD Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan serta pengematan langsung dilapangan, seharusnya penerimaan dari obyek wisata dapat memberikan sumbangan dalam menunjang PAD Kabupaten Gorontalo. Karena daerah Kabupaten Gorontalo memiliki berbagai potensi wisata, baik wisata alam maupun wisata pantai serta wisata pemandian seperti Pentadio Resort di Limboto danTaluhu Barakati di Kecamatan Batudaa.

KataKunci : PotensidanPendapatanAsliDaerah(PAD), Wisata

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Potensi yang sudah terbukti dan diakui dunia bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi yang besar hampir disegala sektor, dimana salah satunya di sektor pariwisata. Sebagai negara yang memiliki potensi pariwisata yang besar, tentu membuat sektor pariwisata Indonesia menjadi sorotan dunia. Karena itu industri pariwisata di Indonesia harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam mengembangkan potensi pariwisatanya.

Pengembangan industri pariwisata sendiri selain mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan wilayah di daerah sekitar obyek wisata, karena dapat memainkan peranannya sebagai industri sektor utama, yaitu sektor unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian daerah terutama bagi daerah yang merupakan daerah otonomi baru. Agar tidak menjadi daerah yang tertinggal, dengan potensi daerah di sektor pariwisata yang dimiliki daerah tersebut, harusnya dapat menjadi suatu batu loncatan untuk mengembangkan daerah tersebut dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata yang ada.

Otonomi daerah memberikan ruang bagi setiap daerah dapat menggali potensi yang bisa dikembangkan, sehingga perkembangan masing-masing daerah dapat meningkat pesat. Terdapat berbagai sektor yang dapat dikembangkan, diantaranya adalah: sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, sektor pariwisata dan lain-lain. Peneliti lebih tertarik dari salah satu sektor tersebut yaitu sektor pariwisata, karena Kabupaten Gorontalo memiliki potensi sektor pariwisata yang layak untuk menjadi tujuan wisata namun masih perlu untuk dikembangan.

“Sebelum membahas secara mendalam, Pariwisata adalah salah satu dari industri baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam

mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan" (Wahab, 2003:05). Sektor pariwisata sangat dimungkinkan karena ketersediaan berbagai potensi pariwisata yang ada serta dukungan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi. Menurut salah satu koordinator pariwisata Kabupaten Gorontalo bahwa sifat dari pariwisata itu sendiri yaitu dinamis, dimana suatu saat akan muncul titik puncak kejenuhan atau kebosanan bagi wisatawan untuk menikmati kondisi yang sudah ada, dan itu sangat berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan ke suatu objek wisata yang pastinya berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata

Dalam hubungannya dengan penggalian sumber-sumber pendapatan di daerah, salah satu sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan atau dapat dijadikan andalan bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dari sektor pariwisata. Kabupaten Gorontalo memiliki potensi besar sektor pariwisata yang cukup mendukung baik pariwisata pantai, maupun pariwisata alam, sehingga diharapkan sektor pariwisata ini menjadi sektor unggulan yang menghasilkan pendapatan daerah terbesar bagi daerah Kabupaten Gorontalo. Sampai saat ini terdapat beberapa obyek wisata yang telah menjadi destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, seperti: Pentadio Resort yang terletak di pusat kota dengan pemandangan danau Limboto, Pemandian Taluhu Barakti, dan obyek wisata alam lainnya.

Dari potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Gorontalo, pemerintah daerah hanya berharap dari segi pemasukan PAD dari Pentadio Resort. Sehingg penerimaan dari sektor pariwisata untuk menunjang PAD masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari target dan realisasi penerimaan retribusi obyek wisata Kabupaten Gorontalo sebagaimana data pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Retribusi Obyek Wisata Kabupaten Gorontalo Tahun 20015 – 2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2015	200.000.000	205.135.114	102,57
2016	240.000.000	201.500.010	83,95
2017	220.000.000	254.010.300	115,46
2018	280.000.000	231.200.154	82,57
2019	305.000.000	198.405.000	65,05
Rata-Rata	249.000.000	218.050.115,60	89,92

Sumber: BKAD Kab. Gorontalo,2020

Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat bahwa penerimaan Retribusi Obyek Wisata Kabupaten Gorontalo dari tahun 2015-2019 rata-rata Rp. 218.050.115,60 atau hanya 89,92 % dari target yang ditetapkan. Rendahnya capaian tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, karena lebih disebabkan kunjungan ke obyek wisata tersebut semata-mata hanya dari Pentadio Resort. Itupun pengunjungnya yang terfokus pada hari libur atau hari sabut dan minggu. Jika hal ini dipahami oleh pihak pengelolah seharusnya penunjung tidak hanya pada hari-hari libur saja, melainkan bisa pada hari-hari lain dengan melakukan berbagai kegiatan yang terpusat di obyek wisata petandio resort. Sementara itu obyek-obyek wisata lainnya bahkan penarikan retribusi tidak maksimal, karena terkait dengan petugas lapangan dan tingginya biaya operasional pengelolah yang menyebabkan setoran pada kas daerah sangat kecil.

Sebagai daerah yang terus bergeliat dalam pembangunan, tentuya Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus berbenah dan melakukan pembangunan di segala sektor. Terutama di sektor pariwisata, karena Kabupaten Gorontalo merupakan daerah dengan potensi pariwisata yang besar tentu harus didukung dengan infrastruktur yang memadai seperti infrastruktur jalan untuk kemudahan akses bagi wisatawan untuk menjangkau tempat tujuan wisatanya serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Pengamatan yang dilakukan selama melakukan observasi ternyata beberapa potensi wisata yang disebutkan di atas, belum maksimal dikelolah dengan baik oleh pemerintah daerah. Hanya obyek Wista Pemandian Pentadio Resortlah yang memiliki berbagai fasilitas inap (walaupun saat ini sudah tidak dikelolah secara professional). Sedankan ditempat-tempat lainnya belum di dukung oleh berbagai fasilitas yang membuat wisatawan bertah untuk berlama-lama di lokasi wisata tersebut.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana potensi wisata dalam mendorong PAD Kabupaten Gorontalo melalui suatu penelitian dengan judul: "Potensi Obyek Wisata Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupten Gorontalo".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penilitian ini adalah bagaimana potensi obyek wisata dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten gorontalo.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana potensi obyek wisata Kabupaten Gorontalo 2) Untuk mengetahui sejauhmana penerimaan sektor pariwisata dalam menunjang pandapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Potensi Pariwisata

Pengertian potensi pariwisata adalah segala sesuatu yang dimiliki daerah tujuan wisata yang berguna untuk pengembangan industri pariwisata tersebut (Bambang Supriadi dan Nanny Roedjinandari,2017;151). Dalam UU No. 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Jadi yang dimaksud dengan potensi wisata adalah sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik sebuah obyek wisata. Dalam penelitian ini potensi dibagi menjadi tiga macam, antara lain: a) Potensi Wisata Alam, b) Potensi Wisata Kebudayaan, c) Potensi Wisata Buatan Manusia (I Gusti Bagus Arjana,2017;90).

Definisi Pariwisata

Menurut Soekadijo (2000) pariwisata secara singkat dapat dirumuskan sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan.

Menurut Suwantoro (2004), istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata yaitu sebagai sesuatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan untuk menghasilkan upah dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu.

Potensi Pengembangan Pariwisata

Menurut Halln dan Soemanto (2017: 35) pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang merupakan penggerak utama sektor kepariwisataan membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah, kerjasama langsung dari kalangan usaha maupun dari pihak swasta.

Menurut Pratiwi (2015: 1074) pengembangan kepariwisataan membawa banyak manfaat dan keuntungan. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sector andalan yang mampu mengalahkan kegiatan ekonomi termasuk kegiatan sector lain yang terkait. Sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan Negara serta penerimaan devisa. meningkat melalui usaha pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan.

Daya Tarik Wisata

Menurut Marpaung (2002) obyek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan atau Aktivitas dan Fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang pada suatu daerah atau tempat tertentu. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan semata-mata hanya merupakan sumber daya potensial dan belum dapat disebut sebagai daya tarik wisata, sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu. Misalnya penyediaan aksebilitas atau fasilitas. Oleh karena itu suatu daya tarik dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Jenis obyek dan daya tarik wisata dibagi ke dalam dua kategori yaitu : a) Obyek dan daya tarik wisata alam. b) Obyek dan daya tarik wisata sosial budaya.

Menurut Cooper, dkk (2005) daya tarik wisata harus mempunyai empat komponen yaitu Atraksi (*attraction*), Aksesibilitas (*accessibilities*), Amenitas atau fasilitas (*amenities*), dan pendukung pariwisata (*ancillary*).

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut (Mardiasmo,2002;132) bahwa Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 20% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian fakta lapangan, karena pendekatan ini peneliti berhadapan langsung dengan fokus masalah yang diteliti serta mudah mendeskripsikannya berdasarkan temuan penelitian. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.M

Menurut Sutopo dan Arief (2010), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Oleh sebab itu permasalahan yang akan diteliti sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pelaku utama dalam

pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Sebagai instrumen utama, peneliti berperan sebagai pengamat penuh, dengan mengadakan pengamatan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya hal yang terjadi di lapangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Gorontalo melalui yaitu OPD terkait dengan kepariwisataan. Adapun rencana penelitian selama 2 bulan, yaitu: Bulan Agustus – September 2020.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi: a) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari suatu instansi atau OPD terkait dengan masalah yang diteliti. b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik : a) Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung di lapangan. b) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara. c) Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan dan melakukan dokumentasi atas suatu kejadian selama penelitian.

Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti dalam mencapai keabsahan data melakukan beberapa teknik untuk memenuhi kriteria tersebut, yakni: 1) Ketekunan pengamatan, bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengematan menyediakan kedamaian. 2) Perpanjangan keikutsertaan, peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Peneliti dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak mempelajari "kebudayaan" dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden, dan membangun kepercayaan subjek. Dengan demikian, penting sekali arti perpanjangan keikutsertaan peneliti itu guna berorientasi dengan situasi, juga guna memastikan apakah konteks itu dipahami dan dihayati. 3) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap tersebut. Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara : a) Triangulasi dengan sumber data, b) Triangulasi dengan metode.

Tahap-tahap Penelitian

Didalam pelaksanaan penelitian mengacu kepada beberapa tahapan yang

dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: a) Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key informan* yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan. b) Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. c) Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tebel ataupun uraian penjelasan.

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verivication*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Letak Geografis, Administratif Dan kondisi Fisik Daerah Penelitian

Kabupaten Gorontalo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Gorontalo yang terletak diantara 0°,47'-1°24' lintang utara dan 124°45' bujur timur. Ibukota Kabupaten Gorontalo adalah Limboto yang berjarak ± 15 km dari Kota Gorontalo. Secara geografis Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten yang terletak dititik tengah Provinsi Gorontalo, secara geografis berada pada 30' – 00 54' Lintang Utara dan 122 07' – 123o 44' Bujur Timur, dengan batas- batas wilayah Kabupaten Gorontalo meliputi : a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara, b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, c) Sebelah Timur berbatasan, d) Sebelah Barat dengan Kabupaten Boalemo.

Kabupaten Gorontalo dengan jumlah penduduk yang terbesar disemua daerah yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk mengetahui perkembangan dan jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Gorontalo, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Perkembangan Penduduk Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Penduduk (Jiwa)	(%)
1.	2015	363.763	-
2.	2016	368.053	1,17
3.	2017	368.149	0,02
4.	2018	370.441	0,61
5.	2019	392.673	6,00
Jumlah Rata-Rata		**372.615,8**	**1,56**

Berdasarkan tabel di atas, ternyata bahwa penduduk Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami perkembangan, dimana pada tahun 2015 penduduk berjumlah 363.763 jiwa meningkat menjadi 368.053 jiwa pada tahun 2013 atau naik dengan 1,19 persen. Tahun 2016 jumlah penduduk meningkat lagi menjadi 368.149 atau tumbuh hanya sebesar 0,2 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 meningkat lagi sehinga menjadi 370.441 jiwa atau tumbuh sebesar 0,61 persen dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo menjadi 392.673 jiwa atau tumbuh sebesar 6 persen lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya.

Gambaran Potensi Ekonomi Kabupaten Gorontalo

Perkembangan suatu daerah antara lain sangat ditentukan oleh berbagai potensi

yang dimiliki, seperti transportasi jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Status jalan menurut kewenangan dan sumber pembiayaan dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok, jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/ kota. Pada tahun 2017 Di Kabupaten Gorontalo 1.381,99 km, semuanya merupakan jalan kabupaten. Pariwisata Sebagai akomodasi dalam dunia pariwisata, peran hotel, penginapan, restoran dan rumah makan sangatlah besar, di tahun 2019 jumlah hotel/penginapan sebanyak 12 usaha.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada daerah yang mengalami inflasi, peningkatan harga beberapa barang tertentu meluas dan berdampak pada meningkatnya harga barang–barang lain. Variabel yang digunakan untuk mengukur inflasi adalah indeks harga konsumen (IHK) barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat perubahan indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukan besarnya laju inflasi yang terjadi.

Selama periode 2012-2016 rata-rata laju inflasi secara umum masih di bawah dua digit, walaupun angkanya sudah relatif tinggi. Kondisi inflasi Kabupaten Gorontalo tahun 2019 mencapai 9,20%, dan untuk tahun 2019 memasuki triwulan IV angka inflasi dapat ditekan menjadi 4,35%, namun masih menunjukkan angka – angka persistensi yang cukup tinggi dibanding laju inflasi nasional yang bertahan pada angka 2,78%.

Pemicu inflasi tertinggi berasal dari sektor kesehatan sebesar 8,22% disusul sektor pendidikan sebesar 0,57% dan jasa transportasi, komunikasi dan keuangan mencapai -2,5 persen. Untuk tahun 2019 tingkat inflasi Gorontalo diprediksi pada kisaran 4 – 6% akibat meningkatnya sisi permintaan terkait dengan semakin menguatnya daya beli masyarakat yang salah satunya diakibatkan naiknya gaji pegawai negeri sipil. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan nasional yang semakin baik, tentunya pemerintah Kabupaten gorontalo harus terus menyesuaikan laju inflasi yang lebih realistis.

Memperhatikan angka – angka ini maka tingkat inflasi Kabupaten Gorontalo masih tergolong pada taraf inflasi ringan (kurang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo 10%/tahun). Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi yang terjadi.

Perkembangan Ekonomi Kabupaten Gorontalo

Perkembangan ekonomi suatu daerah atau wilayah dapat diketahui melalui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB itu sendiri adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau daerah dalam kurun waktu satu tahun yang terbagi dari pada 17 sektor lapangan usaha yaitu ; 1) Sektor Pertanian 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian 3) Sektor Industri Pengolahan 4) Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 5) Sektor Sampah, Limba dan Daur Ulang 6) Sektor Konstruksi 7) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, 8) Sektor Hotel dan Restoran 7) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 8) Sektor Transportasi dan Pergudangan 9) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum 10) Sektor Informasi dan Komunikasi 11) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 12) Real Estat 13) Sektor Jasa Perusahaan 14) Sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial 15) Sektor Jasa Pendidikan 16) Sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17) Jasa-Jasa Lainnya.

Retribusi Obyek Wisata Kabupaten Gorontalo

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian terdahulu dari penelitian ini, bahwa retribusi Obyek Wisata adalah salah satu jenis retribusi jasa usaha yang ditetapkan oleh daerah daerah.

Tabel Perkembangan Retribusi Obyek Wisata Kabupaten Gorontalo Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi (Rp)	%
2015	9.483.000	34,44
2016	68.731.000	624,78
2017	66.950.000	-2,59
2018	329.115.000	391,58
2019	464.573.000	41,16
Rata-Rata	187.770.400	-59,58

Sumber: Badan Keuangan, Kabupaten Gorontalo,2020

Berdasarkan tabel di atas, ternyata bahwa penerimaan retribusi Obyek Wisata Kabupaten Gorontalo dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) sangat fluktuatif atau naik turun.

Kondisi tersebut terjadi karena berbagai permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian pertama penelitian ini, yaitu adanya fasilitas maupun sarana dan prasarana yang tidak menunjang lagi. Permasalahan lain khususnya pada 3 tahun terakhir pegawai pengumpulan yang kurang professional, serta kemampuan pemerintah daerah yang terbatas dalam melakukan perbaikan dan bahkan renovasi fasilitas yang tidak lagi memenuhi syarat untuk dijadikan tempat rekreasi.

Pembahasan

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontibusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah selama ini.

Sampai saat ini, masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan oleh faktor kurangnya kepekaan Pemda dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi pendapatan asli daerah (PAD), kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh stakeholder, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang prorakyat.

Sumber penerimaan daerah mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan yakni kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dengan prinsip dasarnya uang mengikuti fungsi (Money Follow Function) (Yuwono,2008).

Penerimaan daerah yang bersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwujudkan di masing-masing daerah melalui

kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut 7 jenis pajak daerah dan 25 jenis retribusi daerah dan setiap daerah masih diberikan kewenangan untuk memungut retribusi lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing (open list) sepanjang tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan di atas. Demikian pula Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk pemerintah Kabupaten Gorontalo, untuk memungut 12 jenis pajak daerah dan 39 jenis retribusi daerah (sifatnya close list).

Namun demikian, dengan mempertimbangkan potensi dan kemajuan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo saat ini hanya memungut 12 jenis pajak daerah. Untuk retribusi daerah berjumlah 27 yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, hanya ada 26 jenis retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dari masyarakat, sehingga masih terdapat 4 jenis retribusi yang belum sepenuhnya dikelola. Semestinya dengan mempertimbangkan faktor perkembangan aktivitas pembangunan ekonomi Kabupaten Gorontalo yang sangat pesat, sepatutnya Pemerintah Kabupaten Gorontalo memungut pula jenis retribusi tersebut.

Apa yang telah dijelaskan di atas, dimana terkait dengan penerimaan retribusi obyek wisata tidak bisa lepas dari penjelasan PAD yang merupakan komponen retribusi daerah yang telah diuraikan di atas. Tentunya yang yang telah diuraikan di atas, bahwa berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dapat dikatakan telah maksimal. Hal ini terkonfirmasi pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu komponen retribusi daerah yaitu retribusi obyek wisata belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dan nyata terhadap PAD Kabupaten Gorontalo.

Hasil penelitian ini tentang potensi retribusi obyek wisata dalam menunjang PAD di Kabupaten ternyata kurang maksimal bila melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Gorontalo. Jika hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah seharusnya potensi wisata yang begitu baik di Kabupaten Gorontalo akan mampu mendorong meningkatnya Pendapata Asli Daerah. Karena obyek wisata memiliki dampak ikutan terhadap lapangan usaha lain seperti kios, penginapan/hotel dan lain sebagainya serta pada akhirnya akan mampu menunjang penerimaan daerah dari usaha-usaha ikutan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berkut:

Potensi obyek wisata di Kabupaten Gorontalo setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) terus mengalami penurunan dilihat dari capaian realisasi. Namun masih belum mampu memberikan kontribusi dalam menunjang PAD Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan serta pengematan langsung dilapangan, seharusnya penerimaan dari obyek wisata dapat memberikan sumbangan dalam menunjang PAD Kabupaten Gorontalo. Karena daerah Kabupaten Gorontalo memiliki berbagai potensi wisata, baik wisata alam mapun wisata pantai serta wisata pemandian seperti Pentadio Resort di Limboto dan Taluhu Barakati di Kecamatan Batudaa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas, maka beberapa saran

disampaikan sebagai berikut: 1) Obyek wisata Kabupaten Gorontalo memiliki potensi untuk dikembangankan, sangatlah dibutuhkan upaya pemerintag daerah untuk secara serius dan professional dalam mengelolah berbagai obyek wisata yang ada. 2) Sudah seharusnya pemerintah daerah membuka kerja sama dengan pihak swasta dalam mengelolah dan memajukan berbagai potensi wisata yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Supriadi dan Nanny Roedjinandari,2017, Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Malang: Universitas Negeri Malang.

Cooper, dkk. 2005. Tourism Principle and Practive Third Edition. Harlow: Prentice Hall.

Halln dan soemanto. 2017. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam sebagai daerah tujuan wisata di Kabupaten Karanganyar. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

I Gusti Bagus Arjana, 2017, Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Depok: PT Raja Grafindo

Mardiasmo, 2002. Perpajakan. Penerbit: Andi.Jakarta

Marpaung, Happy 2002. Pengetahuan Kepariwisataan. Bandung : Alfabeta

Miles, B. Mathew., Huberman, M. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP

Pratiwi, D. (2015). Peran Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Obyek Wisata Di Daerah Kabupaten Kutai Timur. eJournal Ilmu Pemerintahan.

Soekadijo, R,G, 2000, Anatomi Pariwisata Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sutopo, A, H., Arief, A. 2010. Terampil Mengolah Data Kualitatif. Penerbit Prenada Media Group : Jakarta.

Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta: ANDI

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.